

---

---

## HARMONI DI TENGAH BATAS: Peran Budaya dalam Penyelesaian Konflik Masyarakat Perbatasan Asia Tenggara

**Saiman Pakpahan**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Indonesia;

\* [saiman.pakpahan@lecturer.unri.ac.id](mailto:saiman.pakpahan@lecturer.unri.ac.id) of the corresponding author

---

**Abstract**

*This study aims to analyze the role of culture in conflict resolution in the Southeast Asian border region, particularly in border communities between Indonesia and Malaysia. Using a qualitative approach and case study design, this research seeks to understand the social dynamics, cultural practices, and identity constructions of border communities. Data were collected through document analysis, literature review, and interpretation of findings from relevant dissertation manuscripts. The results indicate that Malay culture functions as a cross-border social space that transcends national borders, serving as the foundation for the formation of harmonious social relations. The social identity of border communities is also dynamic and flexible, allowing for identity negotiations that help de-escalate conflicts. Daily social practices based on cultural values such as solidarity, deliberation, and balance act as informal mechanisms to maintain social stability. These findings affirm that culture is not only an identity but also an effective conflict resolution mechanism. Therefore, it is important to integrate national security approaches with culture-based approaches in formulating more comprehensive and sustainable conflict resolution strategies in the Southeast Asian border region.*

---

**Keywords**

*Malay culture, conflict resolution, social identity, border communities, Southeast Asia*

---

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan menganalisis peran budaya dalam penyelesaian konflik di kawasan perbatasan Asia Tenggara, khususnya di masyarakat perbatasan Indonesia–Malaysia. Dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, studi ini bertujuan memahami dinamika sosial, praktik budaya, dan konstruksi identitas masyarakat perbatasan. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, studi literatur, dan interpretasi temuan dari naskah disertasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan budaya Melayu berfungsi sebagai ruang sosial lintas batas melewati batas negara, serta sebagai dasar terbentuknya relasi sosial yang harmonis. Identitas sosial masyarakat perbatasan juga bersifat dinamis dan fleksibel, sehingga memungkinkan negosiasi identitas yang membantu meredam konflik. Praktik sosial sehari-hari berdasarkan nilai budaya seperti solidaritas, musyawarah, dan keseimbangan berperan sebagai mekanisme informal menjaga stabilitas sosial. Temuan ini menegaskan bahwa budaya tidak hanya sebagai identitas, tetapi juga sebagai mekanisme resolusi konflik yang efektif. Oleh karena itu, pentingnya integrasi pendekatan keamanan negara dan pendekatan berbasis budaya dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik yang lebih komprehensif dan berkelanjutan di kawasan perbatasan Asia Tenggara.*

---

**Kata Kunci**

*budaya Melayu, resolusi konflik, identitas sosial, masyarakat perbatasan, Asia Tenggara*

---

## PENDAHULUAN

Kawasan Asia Tenggara merupakan ruang sosial yang ditandai oleh keberagaman budaya, sejarah interaksi lintas peradaban, serta dinamika politik yang kompleks (Malik, 2008; Singh, 2008). Sejak masa awal, wilayah yang dikenal sebagai “Dunia Melayu” telah menjadi arena pertemuan berbagai pengaruh budaya besar, seperti India, Cina, Islam, hingga Eropa, yang membentuk konfigurasi sosial-budaya yang khas di kawasan ini (Wade, 2022). Proses historis ini melahirkan kesamaan nilai, praktik sosial, serta sistem simbolik yang menghubungkan masyarakat lintas wilayah, bahkan sebelum terbentuknya batas-batas negara modern.

Dalam konteks tersebut, para sarjana telah lama mengkaji keterkaitan budaya dan struktur sosial di Asia Tenggara. Bastin dan Benda (1968), misalnya, menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki pola-pola budaya yang relatif serupa, seperti budaya maritim, feodal-agraris, serta pengaruh Tionghoa dan India yang membentuk sistem sosial dan politik masyarakat. Selain itu, karakteristik masyarakat Melayu juga ditandai oleh relasi kekuasaan yang berbasis pada loyalitas antara penguasa dan rakyat, yang menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa budaya memiliki posisi sentral dalam membentuk keteraturan sosial di kawasan Asia Tenggara.

Lebih lanjut, kajian mengenai identitas sosial menekankan bahwa identitas tidak bersifat tetap, melainkan dibentuk melalui interaksi sosial, representasi budaya, dan relasi kekuasaan yang dinamis (Hall, 2021; McSweeney, 2012). Transformasi sosial yang terjadi akibat perubahan politik, ekonomi, dan budaya mendorong individu maupun kelompok untuk terus menegosiasikan identitas mereka. Dalam konteks masyarakat perbatasan, proses ini menjadi semakin kompleks karena individu berada dalam persimpangan antara identitas nasional dan identitas kultural yang bersifat lintas batas.

Sejumlah penelitian dalam studi kawasan perbatasan juga menunjukkan bahwa kehidupan sosial masyarakat tidak selalu sejalan dengan logika negara. Praktik sosial sehari-hari masyarakat perbatasan Indonesia–Malaysia, misalnya, memperlihatkan adanya hubungan yang harmonis meskipun terdapat dinamika politik yang fluktuatif di tingkat negara. Interaksi sosial, pengalaman subjektif, serta praktik keseharian masyarakat berkontribusi dalam membentuk relasi sosial yang stabil di kawasan perbatasan (Azis et al., 2024; Prasojo, 2012; Suwartiningsih et al., 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat mekanisme sosial yang bekerja di luar kerangka formal negara dalam menjaga kohesi sosial.

Namun demikian, meskipun berbagai kajian telah membahas budaya, identitas, dan masyarakat perbatasan, sebagian besar penelitian masih bersifat terpisah. Kajian tentang budaya cenderung berfokus pada aspek historis dan struktural, sementara studi tentang konflik perbatasan lebih banyak didominasi oleh pendekatan keamanan dan geopolitik yang berorientasi pada negara (*state-centric*) (Gultom et al., 2024; Prasojo, 2012; Rahayu & Supriyadi, 2025; Utomo, 2025). Di sisi lain, kajian identitas sosial sering kali menekankan aspek konstruksi identitas tanpa mengaitkannya secara langsung dengan praktik penyelesaian konflik di tingkat lokal. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa masih terbatasnya penelitian yang secara integratif mengkaji peran budaya sebagai mekanisme resolusi konflik, khususnya dalam konteks masyarakat perbatasan di Asia Tenggara. Padahal, realitas empiris menunjukkan bahwa masyarakat perbatasan memiliki kapasitas untuk mengelola potensi konflik melalui nilai, norma, dan praktik budaya yang mereka miliki.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran budaya dalam penyelesaian konflik di kawasan perbatasan Asia Tenggara, dengan fokus pada masyarakat perbatasan Indonesia–Malaysia. Artikel ini berargumen bahwa budaya tidak hanya berfungsi sebagai identitas kultural, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang efektif dalam meredam konflik dan membangun harmoni di wilayah perbatasan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan

dapat mengisi kesenjangan dalam literatur serta memberikan kontribusi baru dalam studi budaya, identitas, dan resolusi konflik di kawasan Asia Tenggara.

## KERANGKA TEORETIS

Teori yang akan digunakan dalam menganalisis temuan dalam artikel ini adalah budaya, identitas sosial, dan keamanan masyarakat sebagai elemen yang saling berkaitan dalam memahami dinamika konflik di kawasan perbatasan. Identitas yang bersifat dinamis memungkinkan terjadinya negosiasi sosial, sementara budaya menyediakan nilai dan norma yang menjadi dasar interaksi sosial. Di sisi lain, pendekatan *societal security* menegaskan bahwa keberlangsungan identitas dan budaya merupakan bagian dari keamanan itu sendiri.

*Pertama*, Konstruksi Identitas Sosial dalam Perspektif Kritis. Bahwa identitas sosial dalam kajian kontemporer tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang tetap dan esensial, melainkan sebagai konstruksi yang dinamis dan terus berubah. Stuart Hall (2021) menegaskan bahwa identitas merupakan produk dari representasi budaya dan wacana, yang dibentuk melalui relasi kekuasaan serta praktik sosial. Dengan demikian, identitas tidak hanya mencerminkan realitas sosial, tetapi juga berperan dalam membentuk realitas tersebut. Perspektif ini menempatkan identitas sebagai proses yang selalu berada dalam kondisi *becoming*, bukan *being*.

Sejalan dengan itu, McSweeney (2012) melihat identitas sebagai hasil interaksi antara individu dan struktur sosial, di mana identitas kolektif terbentuk melalui pengalaman bersama serta konstruksi makna yang dinegosiasikan secara sosial. Sementara itu, Erikson (1968) menekankan bahwa perubahan sosial dapat mendorong terjadinya transformasi identitas, baik pada tingkat individu maupun kelompok, terutama ketika masyarakat menghadapi situasi yang mengganggu tatanan sosial yang ada (Munley, 1975). Dalam konteks masyarakat perbatasan, identitas sosial menjadi lebih kompleks karena individu berada dalam ruang interaksi yang melibatkan berbagai sistem nilai, termasuk identitas nasional dan identitas kultural lintas batas. Proses negosiasi identitas ini memungkinkan munculnya bentuk identitas yang fleksibel, yang pada gilirannya dapat berfungsi sebagai mekanisme dalam meredam potensi konflik.

*Kedua*, Budaya Melayu sebagai Sistem Nilai dan Integrasi Sosial. Budaya dalam konteks Asia Tenggara, khususnya budaya Melayu, memiliki peran sentral dalam membentuk struktur sosial dan relasi antar kelompok (AM et al., 2022). Sejarah panjang interaksi dengan berbagai peradaban besar, seperti India, Cina, dan Islam, telah membentuk karakter budaya Melayu yang bersifat adaptif dan terbuka (Milner, 2009). Hal ini menjadikan budaya Melayu sebagai sistem nilai yang tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga transnasional di kawasan Asia Tenggara (Riddell, 2001). Bastin dan Benda (1968) mengidentifikasi bahwa struktur sosial di kawasan ini dibentuk oleh pola-pola budaya yang khas, seperti budaya maritim, feodal-agraris, serta pengaruh birokrasi Tionghoa. Dalam konteks masyarakat Melayu, relasi sosial juga ditandai oleh pentingnya loyalitas antara penguasa dan rakyat sebagai dasar stabilitas sosial (N. S. Y. Ahmad, 2017). Nilai-nilai seperti musyawarah, harmoni, dan keseimbangan menjadi bagian penting dalam menjaga keteraturan sosial.

Selain itu, bahasa Melayu sebagai *lingua franca* di kawasan Asia Tenggara memperkuat integrasi sosial antar komunitas lintas batas (Manaf & Abu, 2011; Sahril, 2020). Kesamaan bahasa, nilai, dan praktik budaya ini memungkinkan terciptanya ruang sosial bersama yang melampaui batas negara. Dalam konteks ini, budaya tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mampu menjembatani perbedaan dan mengurangi potensi konflik.

*Ketiga*, *Societal Security* dan Dinamika Sosial di Kawasan Perbatasan (Floyd, 2025; Høyland, 2018; Topchiev, 2025). Pendekatan *societal security* dalam kerangka Copenhagen School

menekankan bahwa keamanan tidak hanya berkaitan dengan negara, tetapi juga dengan keberlangsungan identitas suatu masyarakat. Keamanan masyarakat (*societal security*) berkaitan dengan kemampuan suatu kelompok untuk mempertahankan identitas, nilai, dan praktik sosial mereka dalam menghadapi berbagai perubahan dan ancaman. Dalam konteks masyarakat perbatasan Indonesia–Malaysia, dinamika keamanan tidak selalu ditentukan oleh kebijakan negara, tetapi juga oleh praktik sosial masyarakat itu sendiri. Penelitian dalam disertasi ini menunjukkan bahwa praktik sosial sehari-hari, pengalaman subjektif, serta interaksi lintas batas berkontribusi dalam membentuk hubungan sosial yang harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan sosial di tingkat masyarakat sering kali dibangun melalui mekanisme informal yang berbasis pada budaya dan relasi sosial.

Pendekatan ini memberikan perspektif bahwa konflik tidak selalu harus diselesaikan melalui intervensi negara, tetapi dapat dikelola melalui praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, budaya menjadi bagian integral dari sistem keamanan sosial yang berfungsi dalam menjaga stabilitas dan harmoni di kawasan perbatasan. Dengan demikian, dalam konteks masyarakat perbatasan Asia Tenggara, budaya dapat dipahami sebagai mekanisme yang tidak hanya membentuk identitas, tetapi juga berfungsi sebagai alat dalam meredam konflik dan membangun harmoni sosial. Kerangka teoretis ini menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana praktik budaya di tingkat lokal berkontribusi terhadap penyelesaian konflik di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam peran budaya dalam penyelesaian konflik di kawasan perbatasan Asia Tenggara, khususnya pada masyarakat perbatasan Indonesia–Malaysia. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap dinamika sosial, praktik budaya, serta pengalaman subjektif masyarakat yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Stephan, 2014). Studi kasus digunakan untuk mengkaji fenomena secara kontekstual dan holistik, dengan menempatkan masyarakat perbatasan sebagai unit analisis utama dalam memahami interaksi antara budaya, identitas sosial, dan konflik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi analisis dokumen, observasi sosial, dan studi literatur yang bersumber dari naskah disertasi serta referensi akademik yang relevan. Analisis dokumen dilakukan terhadap data yang menggambarkan praktik sosial, relasi lintas batas, serta dinamika identitas masyarakat perbatasan. Observasi sosial digunakan untuk memahami pola interaksi sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan Masyarakat (Brooks et al., 2019). Sementara itu, studi literatur digunakan untuk memperkuat landasan teoretis, khususnya yang berkaitan dengan konstruksi identitas, budaya Melayu, dan pendekatan *societal security* dalam studi keamanan.

Analisis data dilakukan secara interpretatif dengan menggunakan teknik analisis tematik. Data yang diperoleh diklasifikasikan ke dalam tema-tema utama, seperti praktik budaya, konstruksi identitas sosial, dan mekanisme penyelesaian konflik (Marvasti, 2011). Selanjutnya, data dianalisis dengan mengacu pada kerangka teori yang telah disusun untuk mengidentifikasi hubungan antara budaya dan resolusi konflik dalam konteks masyarakat perbatasan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap bagaimana budaya tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang berperan dalam menjaga harmoni dan meredam konflik di kawasan perbatasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Budaya Melayu sebagai Ruang Sosial Lintas Batas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya Melayu berfungsi sebagai ruang sosial yang melampaui batas-batas negara modern di kawasan Asia Tenggara. Secara historis, pembentukan “Dunia Melayu” tidak berlangsung secara linear, melainkan melalui proses panjang interaksi dan migrasi yang dimulai sejak periode awal, seperti kedatangan Proto-Melayu dan Deutero-Melayu yang membawa perkembangan teknologi dan sistem sosial yang lebih kompleks (Sidiq & Harto, 2015). Perkembangan ini kemudian dilanjutkan dengan fase interaksi intensif dengan peradaban besar dunia, terutama India dan Cina melalui jalur perdagangan sejak abad awal Masehi, yang memperkaya struktur budaya lokal dalam bentuk sistem kepercayaan, bahasa, seni, dan organisasi sosial (A. S. Ahmad, 2003). Pada periode selanjutnya, masuknya Islam memperkuat integrasi budaya Melayu melalui penyatuan nilai-nilai religius dan sosial, sebelum akhirnya pengaruh Eropa turut membentuk dinamika politik dan pembagian wilayah menjadi negara-bangsa modern.

Lebih jauh, Bastin dan Benda (1968) dalam kajiannya mengidentifikasi bahwa konfigurasi budaya di Asia Tenggara terbentuk melalui beberapa pola utama, seperti budaya maritim yang berkembang di pusat-pusat perdagangan seperti Sriwijaya, budaya feodal-agraris yang berbasis pada sistem irigasi dan kekuasaan kerajaan, serta pengaruh birokrasi Tionghoa di kawasan Indochina. Keragaman pola ini tidak menghasilkan fragmentasi, melainkan justru membentuk kesamaan struktur sosial dan nilai-nilai dasar, seperti pentingnya relasi kekuasaan, loyalitas, dan keteraturan sosial yang menjadi ciri khas masyarakat Melayu. Selain itu, penyebaran bahasa Melayu sebagai *lingua franca* sejak setidaknya abad ke-13 memperkuat konektivitas antarwilayah, memungkinkan terjadinya komunikasi dan pertukaran budaya secara luas di seluruh kawasan nusantara .

Konfigurasi historis dan kultural tersebut pada akhirnya melahirkan jaringan sosial lintas batas yang tetap bertahan hingga era negara-bangsa modern. Di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia, kesamaan budaya, bahasa, dan praktik sosial ini memungkinkan masyarakat untuk membangun relasi yang tidak sepenuhnya terikat pada batas administratif negara (Fee, 2001). Budaya Melayu dalam konteks ini berfungsi sebagai *shared cultural system* yang menciptakan rasa kebersamaan, solidaritas, dan keterhubungan antar komunitas. Dengan demikian, budaya tidak hanya menjadi identitas simbolik, tetapi juga menjadi infrastruktur sosial yang menghubungkan masyarakat lintas wilayah dan menjadi dasar bagi terbentuknya ruang sosial yang relatif stabil dan harmonis di kawasan perbatasan.

Kesamaan budaya tersebut diperkuat oleh keberadaan bahasa Melayu sebagai *lingua franca* yang telah lama digunakan dalam interaksi sosial dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Dalam naskah disertasi ini dijelaskan bahwa bahasa Melayu berasal dari kawasan Sumatera dan kemudian menyebar ke Semenanjung Malaysia serta wilayah lain di kepulauan Melayu melalui proses migrasi dan aktivitas perdagangan sejak setidaknya abad ke-13 Masehi (Shamsul, 1996). Bahkan, terdapat indikasi bahwa fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa perantara telah muncul jauh lebih awal, terutama dalam konteks jaringan perdagangan maritim yang menghubungkan berbagai wilayah di Asia Tenggara. Peran historis ini menjadikan bahasa Melayu tidak hanya sebagai alat komunikasi praktis, tetapi juga sebagai medium utama dalam pertukaran budaya dan pembentukan kesadaran kolektif regional (Daniels, 2014).

Lebih dari sekadar instrumen komunikasi, bahasa Melayu juga berfungsi sebagai simbol identitas kolektif yang memperkuat rasa kebersamaan di antara masyarakat lintas batas. Dalam konteks masyarakat perbatasan Indonesia–Malaysia, penggunaan bahasa yang sama memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang cair tanpa hambatan linguistik yang signifikan (Sahril, 2020). Hal ini memperkuat terbentuknya kedekatan sosial, rasa saling memahami, serta

solidaritas yang melampaui identitas nasional formal. Bahasa dalam hal ini tidak netral, melainkan menjadi bagian dari konstruksi identitas sosial yang mempertemukan individu dalam satu kerangka makna yang sama.

Dengan demikian, bahasa Melayu berperan sebagai infrastruktur kultural yang memungkinkan terbentuknya ruang sosial bersama (*shared social space*) di kawasan perbatasan. Peran ini tidak terlepas dari posisi historis bahasa Melayu sebagai *lingua franca* yang berkembang melalui jaringan perdagangan maritim dan mobilitas sosial di kawasan Asia Tenggara sejak periode awal penyebarannya. Sebagai bahasa penghubung, bahasa Melayu tidak hanya memfasilitasi komunikasi antarkelompok, tetapi juga menjadi medium utama dalam pertukaran nilai, norma, dan praktik sosial yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat lintas wilayah.

Kesamaan bahasa ini selanjutnya memfasilitasi terbentuknya jaringan sosial, ekonomi, dan kekerabatan yang tidak sepenuhnya tunduk pada batas geografis negara. Dalam konteks masyarakat perbatasan Indonesia–Malaysia, penggunaan bahasa yang sama memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih cair dan intens, baik dalam aktivitas perdagangan, hubungan sosial, maupun jaringan keluarga yang melintasi batas negara (Primawati, 2018). Kondisi ini menciptakan apa yang dapat dipahami sebagai ruang sosial transnasional, di mana batas administratif negara menjadi kurang signifikan dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam konteks tersebut, budaya Melayu tidak hanya menjadi fondasi identitas, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme integratif yang menghubungkan komunitas lintas wilayah. Bahasa sebagai bagian dari budaya memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan (*trust*), memperkuat solidaritas, serta memfasilitasi proses negosiasi sosial yang diperlukan dalam mengelola perbedaan. Dengan demikian, ruang sosial yang terbentuk bukan sekadar hasil dari kesamaan kultural, tetapi merupakan konstruksi sosial yang terus direproduksi melalui praktik interaksi sehari-hari. Hal ini menjelaskan mengapa masyarakat perbatasan mampu mempertahankan stabilitas dan harmoni sosial di tengah keberadaan batas-batas politik modern yang secara formal memisahkan mereka.

### **Negosiasi Identitas Sosial dalam Masyarakat Perbatasan**

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat perbatasan mengalami proses negosiasi identitas yang dinamis dan kontekstual. Identitas sosial dalam hal ini tidak dipahami sebagai sesuatu yang tetap atau esensial, melainkan sebagai hasil dari interaksi sosial yang terus berlangsung dan mengalami perubahan seiring dengan dinamika sosial yang ada. Dalam naskah disertasi ini ditegaskan bahwa identitas merupakan konstruksi yang dibentuk melalui relasi sosial, representasi budaya, serta relasi kekuasaan yang bekerja dalam masyarakat (Caldwell, 1970). Proses ini semakin kompleks ketika masyarakat dihadapkan pada perubahan sosial, seperti interaksi lintas negara, mobilitas penduduk, dan pengaruh kebijakan politik, yang mendorong individu dan kelompok untuk terus menegosiasikan posisi dan afiliasi identitas mereka.

Dalam konteks perbatasan Indonesia–Malaysia, individu dan kelompok tidak hanya mengidentifikasi diri sebagai warga negara dalam kerangka nasional, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas budaya Melayu yang memiliki kesamaan historis, bahasa, dan nilai-nilai sosial. Kesamaan ini berakar pada sejarah panjang pembentukan “Dunia Melayu” yang melampaui batas negara modern dan membentuk keterhubungan kultural di kawasan Asia Tenggara (Noak et al., 2024). Kondisi tersebut melahirkan apa yang dapat disebut sebagai identitas ganda atau bahkan berlapis, di mana identitas nasional dan identitas kultural tidak saling meniadakan, melainkan hidup berdampingan dan saling melengkapi dalam praktik sosial sehari-hari.

Fleksibilitas identitas ini memungkinkan masyarakat perbatasan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi sosial yang dihadapi. Dalam interaksi tertentu, identitas nasional dapat menjadi dominan, terutama dalam konteks administratif dan politik. Namun, dalam kehidupan sosial sehari-hari, identitas kultural Melayu sering kali lebih menonjol karena memberikan rasa

kedekatan, kepercayaan, dan solidaritas. Dengan demikian, negosiasi identitas yang berlangsung secara terus-menerus ini berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memungkinkan masyarakat untuk mengelola perbedaan secara adaptif, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir tanpa harus berujung pada konfrontasi terbuka. Identitas yang bersifat cair dan fleksibel ini pada akhirnya menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga harmoni sosial di kawasan perbatasan.

Lebih jauh, transformasi identitas sosial yang terjadi dalam masyarakat perbatasan juga dipengaruhi oleh perubahan sosial yang lebih luas, termasuk dinamika politik, ekonomi, serta interaksi lintas negara yang semakin intens. Dalam naskah disertasi ini dijelaskan bahwa transformasi sosial dapat mengganggu sekaligus merekonstruksi struktur sosial, nilai, dan identitas yang telah ada, sehingga mendorong individu dan kelompok untuk melakukan evaluasi ulang terhadap posisi dan afiliasi mereka dalam masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya berasal dari kebijakan negara atau tekanan eksternal, tetapi juga dari pengalaman hidup sehari-hari masyarakat perbatasan yang terus berhadapan dengan realitas sosial yang bersifat ganda—antara nasional dan kultural (Than, 2005).

Namun demikian, fleksibilitas identitas yang dimiliki masyarakat perbatasan justru menjadi sumber kekuatan dalam menjaga stabilitas sosial. Alih-alih menimbulkan ketegangan, kemampuan untuk beradaptasi dan menyesuaikan identitas dalam berbagai konteks sosial memungkinkan individu untuk membangun relasi yang lebih inklusif dan terbuka. Identitas yang tidak kaku memberikan ruang bagi terciptanya komunikasi yang lebih efektif, karena individu tidak terjebak dalam batasan-batasan identitas yang rigid dan eksklusif.

Dalam konteks ini, fleksibilitas identitas dapat dipahami sebagai bentuk *social resilience* yang memungkinkan masyarakat perbatasan untuk merespons perubahan sosial tanpa harus mengalami disintegrasi. Transformasi identitas yang dipicu oleh dinamika politik, ekonomi, dan interaksi lintas negara mendorong individu dan kelompok untuk terus menyesuaikan posisi sosial mereka dalam berbagai konteks (Heng, 2014). Namun, alih-alih menciptakan ketegangan, kemampuan adaptif ini justru memperkuat daya lenting sosial (*resilience*), karena masyarakat memiliki kapasitas untuk mengelola perubahan tanpa kehilangan kohesi sosial yang telah terbentuk.

Ruang dialog dan adaptasi yang muncul dari proses negosiasi identitas tersebut menjadi mekanisme penting dalam meredam potensi konflik. Dalam praktiknya, masyarakat perbatasan mengembangkan pola interaksi yang memungkinkan terjadinya komunikasi terbuka, penyesuaian peran sosial, serta pengakuan terhadap perbedaan tanpa harus mengarah pada konfrontasi (Tene, 2024). Proses ini mencerminkan apa yang dapat disebut sebagai *everyday negotiation of identity*, di mana identitas tidak dipaksakan secara kaku, tetapi dinegosiasikan secara situasional sesuai dengan kebutuhan interaksi sosial.

Dengan demikian, harmoni sosial yang tercipta bukanlah kondisi yang statis, melainkan hasil dari proses dinamis yang terus berlangsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Identitas yang bersifat cair (*fluid identity*) dan adaptif memungkinkan terbentuknya keseimbangan antara berbagai kepentingan sosial yang ada. Dalam konteks ini, harmoni sosial bukan sekadar ketiadaan konflik, tetapi merupakan hasil dari kemampuan masyarakat dalam mengelola perbedaan secara konstruktif melalui mekanisme sosial yang berbasis pada fleksibilitas identitas dan nilai-nilai budaya yang mereka miliki.

### **Praktik Sosial dan Mekanisme Harmoni di Kawasan Perbatasan**

Penelitian ini menemukan bahwa praktik sosial sehari-hari masyarakat perbatasan memainkan peran penting dalam menjaga hubungan yang harmonis. Interaksi lintas batas yang berlangsung secara rutin tidak hanya terbatas pada aktivitas ekonomi, seperti perdagangan tradisional dan mobilitas barang, tetapi juga mencakup hubungan sosial dan kekerabatan yang telah terjalin secara historis. Pola interaksi ini membentuk jaringan sosial yang bersifat saling

bergantung (*interdependence*), di mana masyarakat di kedua sisi perbatasan memiliki kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas hubungan. Kondisi ini menciptakan hubungan yang kooperatif dan berkelanjutan, sehingga konflik yang berpotensi muncul dapat diredam melalui mekanisme sosial yang sudah terbangun secara alamiah.

Temuan lainnya adalah bahwa pengalaman subjektif dan praktik keseharian masyarakat memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk hubungan sosial yang stabil di kawasan perbatasan (Gamu et al., 2025). Interaksi yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai *everyday peace*, yaitu kondisi damai yang dibangun dari bawah (*bottom-up*) melalui praktik sosial, bukan melalui kebijakan formal negara. Dalam konteks ini, masyarakat perbatasan mengembangkan cara-cara tersendiri dalam mengelola perbedaan, seperti melalui komunikasi langsung, negosiasi informal, serta pemanfaatan jaringan sosial yang telah ada.

Harmoni yang tercipta dengan demikian bukan merupakan hasil dari intervensi formal negara, melainkan dari interaksi sosial yang berbasis pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, seperti saling menghormati, solidaritas, dan keseimbangan (Manado et al., 2024). Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam menyelesaikan potensi konflik secara damai. Dengan demikian, praktik sosial masyarakat perbatasan dapat dipahami sebagai bentuk *local wisdom* yang berfungsi sebagai mekanisme resolusi konflik berbasis budaya. Mekanisme ini bekerja secara informal namun efektif, karena berakar pada pengalaman kolektif dan hubungan sosial yang telah terbangun dalam jangka panjang.

Selain itu, struktur sosial budaya Melayu yang menekankan pentingnya relasi dan loyalitas sosial juga berperan signifikan dalam menjaga keteraturan sosial di kawasan perbatasan. Dalam naskah disertasi ini dijelaskan bahwa karakteristik masyarakat Melayu secara historis dibangun atas dasar hubungan antara penguasa dan masyarakat yang bertumpu pada loyalitas dan keterikatan sosial, di mana stabilitas kekuasaan sangat bergantung pada kesetiaan dan keharmonisan hubungan tersebut. Pola relasi ini kemudian tidak hanya berhenti pada struktur politik tradisional, tetapi juga terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat sebagai nilai yang mengatur interaksi antarindividu dan kelompok.

Nilai-nilai seperti penghormatan terhadap sesama, solidaritas sosial, serta keseimbangan dalam hubungan sosial menjadi prinsip yang terus direproduksi dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat perbatasan (Mohamad Hanafiah & Che Yaacob, 2020). Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman normatif dalam menyelesaikan perbedaan secara damai, di mana konflik tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus dikonfrontasi secara terbuka, melainkan dikelola melalui pendekatan persuasif, musyawarah, dan menjaga hubungan baik antar pihak. Dengan demikian, terdapat kecenderungan kuat dalam budaya Melayu untuk menghindari eskalasi konflik yang dapat merusak harmoni sosial.

Dalam konteks ini, praktik sosial masyarakat perbatasan dapat dipahami sebagai bentuk *local wisdom* yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga operasional dalam mengelola kehidupan sosial. *Local wisdom* tersebut terwujud dalam berbagai praktik keseharian, seperti pola komunikasi yang mengedepankan keharmonisan, mekanisme musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan, serta pemeliharaan relasi kekerabatan yang melintasi batas negara. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa nilai budaya tidak berhenti pada tataran norma, tetapi diinternalisasi dan direproduksi secara terus-menerus dalam tindakan sosial masyarakat.

*Local wisdom* tersebut bekerja sebagai mekanisme sosial yang efektif karena berakar pada pengalaman kolektif dan nilai-nilai yang telah mengakar dalam masyarakat. Dalam naskah disertasi ini ditunjukkan bahwa interaksi sosial yang berlangsung secara berulang dalam kehidupan sehari-hari membentuk pola hubungan yang stabil dan saling memahami di kawasan perbatasan. Hal ini menjadikan *local wisdom* tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga

sebagai sistem pengetahuan praktis yang digunakan masyarakat untuk mengelola konflik, menjaga keseimbangan sosial, dan mempertahankan kohesi komunitas.

Oleh karena itu, harmoni yang tercipta di kawasan perbatasan tidak semata-mata merupakan hasil dari struktur formal atau intervensi negara, tetapi merupakan manifestasi dari sistem nilai budaya yang secara aktif dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Harmoni tersebut dibangun melalui proses *bottom-up* yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga hubungan sosial yang seimbang. Dengan demikian, *local wisdom* dapat dipahami sebagai fondasi dari mekanisme resolusi konflik berbasis budaya, yang bekerja secara informal namun efektif dalam menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan di kawasan perbatasan.

### **Budaya sebagai Mekanisme Resolusi Konflik di Perbatasan Asia Tenggara**

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya memiliki peran strategis sebagai mekanisme resolusi konflik di kawasan perbatasan. Budaya tidak hanya berfungsi sebagai penanda identitas kolektif, tetapi juga sebagai sistem nilai dan praktik sosial yang secara aktif membentuk cara masyarakat dalam memahami, merespons, dan mengelola perbedaan. Dalam konteks masyarakat perbatasan Indonesia–Malaysia, kesamaan budaya Melayu—yang tercermin dalam bahasa, nilai sosial, serta praktik keseharian—menjadi landasan bagi terbentuknya pola interaksi yang kooperatif dan saling memahami. Dengan demikian, budaya berfungsi sebagai *social regulatory system* yang mengarahkan individu dan kelompok untuk menyelesaikan perbedaan secara konstruktif tanpa harus melalui konflik terbuka.

Lebih jauh, budaya dalam hal ini bekerja sebagai medium yang menjembatani kepentingan yang beragam melalui mekanisme informal, seperti musyawarah, negosiasi sosial, serta pemeliharaan relasi kekerabatan dan solidaritas komunitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik-praktik ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap konflik, tetapi juga preventif, karena mampu menciptakan kondisi sosial yang meminimalkan kemungkinan terjadinya eskalasi konflik. Hal ini memperlihatkan bahwa resolusi konflik di kawasan perbatasan tidak selalu bergantung pada intervensi formal negara, melainkan dapat berlangsung secara organik melalui praktik budaya yang hidup dalam Masyarakat (Rahmawati & Afif, 2023).

Berbeda dengan pendekatan keamanan tradisional yang berfokus pada negara (*state-centric*), temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik di tingkat lokal lebih banyak ditentukan oleh mekanisme sosial yang berbasis budaya (Panić, 2009). Perspektif ini sejalan dengan pendekatan *societal security* dalam kerangka Copenhagen School, yang menekankan bahwa keamanan suatu komunitas terletak pada kemampuannya untuk mempertahankan identitas, nilai, dan praktik sosialnya di tengah perubahan (Wilkinson, 2007). Dalam konteks masyarakat perbatasan, keberlangsungan identitas budaya Melayu menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas sosial, karena identitas tersebut menyediakan kerangka nilai yang mengatur interaksi sosial secara damai.

Dengan demikian, keamanan di kawasan perbatasan tidak hanya ditentukan oleh stabilitas politik atau kontrol teritorial negara, tetapi juga oleh kapasitas masyarakat dalam mereproduksi harmoni sosial melalui budaya. Dalam konteks ini, keamanan tidak lagi semata-mata dipahami sebagai kondisi bebas dari ancaman eksternal, melainkan sebagai proses sosial yang terus dibangun melalui interaksi, nilai, dan praktik keseharian masyarakat. Temuan dalam disertasi ini menunjukkan bahwa hubungan sosial yang harmonis di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia terbentuk dari praktik sosial yang berulang dan pengalaman subjektif masyarakat yang memperkuat kohesi sosial. Hal ini menegaskan bahwa dimensi sosial dan kultural memiliki peran yang tidak kalah penting dibandingkan dimensi politik dalam membentuk stabilitas kawasan.

Budaya dalam hal ini tidak hanya menjadi elemen pelengkap, tetapi merupakan fondasi utama dari *bottom-up peacebuilding*, di mana masyarakat secara aktif membangun dan mempertahankan perdamaian melalui praktik sosial sehari-hari. Nilai-nilai budaya Melayu,

seperti solidaritas, keseimbangan, dan penghormatan terhadap relasi sosial, berfungsi sebagai pedoman normatif sekaligus mekanisme praktis dalam mengelola perbedaan dan mencegah konflik terbuka. Dengan demikian, perdamaian yang tercipta bukanlah hasil dari intervensi struktural semata, tetapi merupakan manifestasi dari sistem nilai yang hidup dan terus direproduksi dalam kehidupan masyarakat.

Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa pendekatan berbasis budaya perlu dipertimbangkan sebagai strategi alternatif dalam resolusi konflik di kawasan perbatasan. Pendekatan ini tidak hanya melengkapi, tetapi juga mengoreksi keterbatasan pendekatan keamanan konvensional yang cenderung berfokus pada aspek teritorial, kontrol negara, dan stabilitas politik formal. Dalam konteks masyarakat perbatasan, realitas sosial menunjukkan bahwa konflik lebih sering dikelola melalui mekanisme informal yang berakar pada nilai, norma, dan praktik budaya yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pendekatan berbasis budaya menawarkan perspektif yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial lokal.

Dalam konteks Asia Tenggara yang memiliki karakteristik sosial-budaya yang saling terhubung, pendekatan ini menjadi semakin relevan. Sejarah panjang interaksi lintas wilayah, kesamaan budaya Melayu, serta keberadaan bahasa sebagai penghubung sosial menciptakan apa yang dapat dipahami sebagai *cultural connectivity* yang melampaui batas negara. Kondisi ini menjadikan masyarakat perbatasan tidak hanya terikat oleh struktur politik formal, tetapi juga oleh jaringan sosial dan kultural yang bersifat transnasional. Oleh karena itu, pendekatan berbasis budaya memiliki kemampuan untuk menjangkau dimensi sosial yang sering kali tidak tersentuh oleh kebijakan formal negara, seperti kepercayaan (*trust*), solidaritas, dan praktik sosial sehari-hari.

Lebih jauh, temuan ini menunjukkan bahwa diperlukan integrasi antara pendekatan keamanan negara (*state security*) dan pendekatan berbasis budaya (*societal security*) dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik yang lebih komprehensif. Pendekatan negara tetap penting dalam menjaga stabilitas politik dan kedaulatan wilayah, namun tanpa didukung oleh mekanisme sosial berbasis budaya, upaya tersebut cenderung bersifat parsial dan kurang berkelanjutan. Sebaliknya, pendekatan berbasis budaya mampu memperkuat fondasi sosial dari perdamaian melalui praktik *bottom-up peacebuilding* yang berakar pada kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, integrasi kedua pendekatan tersebut menjadi kunci dalam menciptakan strategi resolusi konflik yang tidak hanya efektif secara struktural, tetapi juga berkelanjutan secara sosial. Pendekatan yang menggabungkan dimensi formal dan informal ini memungkinkan terciptanya model penyelesaian konflik yang lebih adaptif, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat perbatasan di Asia Tenggara. Temuan ini sekaligus memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan, bahwa pengakuan terhadap peran budaya sebagai instrumen resolusi konflik perlu diinstitutionalisasi dalam kerangka kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada realitas sosial masyarakat.

## **PENUTUP**

Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik di kawasan perbatasan Asia Tenggara, terutama di masyarakat perbatasan Indonesia–Malaysia. Budaya Melayu, yang terbentuk melalui proses sejarah panjang dan interaksi antar peradaban, tidak hanya menjadi identitas kolektif tetapi juga sebagai sistem nilai dan praktik sosial yang mengatur hubungan masyarakat. Kesamaan bahasa, nilai, dan kebiasaan sosial menciptakan ruang sosial bersama yang melampaui batas negara dan menjadi dasar hubungan harmonis di kawasan perbatasan.

Temuan penelitian juga menegaskan bahwa identitas sosial masyarakat perbatasan bersifat dinamis dan fleksibel, bukan tetap. Identitas ini merupakan hasil negosiasi sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Fleksibilitas ini memungkinkan masyarakat beradaptasi terhadap perubahan sosial sekaligus meredam potensi konflik. Dalam konteks ini, praktik sosial sehari-hari yang berlandaskan nilai budaya, seperti solidaritas, musyawarah, dan keseimbangan, berperan sebagai kearifan lokal yang efektif menjaga stabilitas sosial. Selain itu, penelitian menemukan bahwa resolusi konflik di kawasan perbatasan tidak hanya bergantung pada pendekatan keamanan negara, tetapi juga pada mekanisme sosial berbasis budaya yang berkembang dalam masyarakat. Perspektif societal security menunjukkan bahwa keberlangsungan identitas dan nilai budaya adalah aspek penting dari keamanan itu sendiri. Oleh karena itu, integrasi pendekatan keamanan nasional dan berbasis budaya menjadi kunci dalam strategi penyelesaian konflik yang lebih komprehensif, kontekstual, dan berkelanjutan.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian hubungan antara budaya, identitas sosial, dan resolusi konflik di kawasan perbatasan. Secara praktis, temuan ini menyarankan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan harus memperhatikan peran budaya sebagai instrumen utama dalam membangun perdamaian. Dengan demikian, pendekatan berbasis budaya tidak hanya relevan tetapi juga esensial untuk mewujudkan harmoni sosial di kawasan Asia Tenggara yang kaya karakter sosial-budaya yang saling terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. S. (2003). Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. *Dewan Bahasa Dan Pustaka*.
- Ahmad, N. S. Y. (2017). Menilai Semula Konsep Hegemoni Dalam Budaya Politik Melayu. *Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu*, (July 2017).
- Azis, M. N. I., Saptaningrum, I., Fawaid, I., & Setiawan, A. M. (2024). Mencari Identitas: Dinamika Masyarakat Perbatasan Indonesia-Filipina, 1975-2014. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13(1). <https://doi.org/10.23887/jish.v13i1.74945>
- Bastin, J., & Benda, H. J. (1968). *A history of Modern Southeast Asia: Colonialism, Nationalism and Decolonization*. Prentice-Hall, Inc.
- Brooks, H., Bee, P., & Rogers, A. (2019). Introduction to qualitative research methods. In *A research handbook for patient and public involvement researchers*. <https://doi.org/10.7765/9781526136527.00012>
- Caldwell, M. (1970). War and Peace in South-East Asia and A History of Modern Southeast Asia: Colonialism, Nationalism and Decolonization. *International Affairs*, 46(3). <https://doi.org/10.2307/2613289>
- Daniels, T. P. (2014). Modern Muslim identities: Negotiating religion and ethnicity in Malaysia. *Anthropological Forum*, 24(1). <https://doi.org/10.1080/00664677.2013.796611>
- Erikson, E. H. (1968). Youth: Identity and crisis. In *New York, NY: WW* (Number 96).
- Fee, L. K. (2001). The Construction of Malay Identity across Nations Malaysia, Singapore, and Indonesia. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 157(4).
- Floyd, R. (2025). Ontological vs. societal security: same difference or distinct concepts? *International Politics*, 62(4). <https://doi.org/10.1057/s41311-024-00581-w>
- Gamu, F. A., Sanjaya, D. B., & Suastika, I. N. (2025). Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural di Kawasan Perbatasan Timur Indonesia: Membangun Identitas Nasional yang Inklusif dan Kohesi Sosial di Kalangan Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1.

- Gultom, M., Rizqullah, F. H., Iqbal, M., Cahyadi, H. R., & Syahrin, M. (2024). Analisis Yuridis terhadap Strategi Geopolitik di Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam Menghadapi Tantangan Sengketa Wilayah Perbatasan. *ADIL Indonesia Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.35473/aij.v5i2.3672>
- Hall, S. (2021). Cultural identity and diaspora. In *Contemporary Postcolonial Theory: A Reader*. <https://doi.org/10.4324/9781003135593-8>
- Heng, P. K. (2014). The “Asean Way” and Regional Security Cooperation in the South China Sea. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2540049>
- Høyland, S. A. (2018). Exploring and modeling the societal safety and societal security concepts – A systematic review, empirical study and key implications. *Safety Science*, 110. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2017.10.019>
- AM, H., Munir, A., & AM, A. B. (2022). Tradisi dan Jaringan Keulamaan Melayu-Nusantara; Geneologi Keilmuan Ulama Melayu. *ISAH 2022 (International Seminar on Adab and Humanities)*, 2022.
- Malik, J. (2008). Islam in South Asia: A short history. In *Themes in Islamic Studies* (Vol. 4). <https://doi.org/10.1177/0049085713494310>
- Manado, I., Manado, I., & Manado, I. (2024). Identitas Komunitas Islam Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina. *Jurnal Interdisipliner Sosiologi Agama (JINSA)*, 04(2).
- Manaf, J. A., & Abu, R. (2011). Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu, Perkamusan, dan Terjemahan. *Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia*.
- Marvasti, A. (2011). Qualitative Research in Sociology. In *Qualitative Research in Sociology*. <https://doi.org/10.4135/9781849209700>
- McSweeney, F. (2012). Student, Practitioner, or Both? Separation and Integration of Identities in Professional Social Care Education. *Social Work Education*, 31(3). <https://doi.org/10.1080/02615479.2011.557428>
- Milner, A. (2009). The Malays. In *The Malays*. <https://doi.org/10.1002/9781444305098>
- Mohamad Hanafiah, M. N. A.-H., & Che Yaacob, M. F. (2020). Nilai-nilai Islam dan Pembentukan Akhlak dalam Cerita Rakyat Melayu. *International Journal of Language Education and Applied Linguistics*. <https://doi.org/10.15282/ijleal.v10.4369>
- Munley, P. H. (1975). Erik Erikson’s theory of psychosocial development and vocational behavior. *Journal of Counseling Psychology*, 22(4). <https://doi.org/10.1037/h0076749>
- Noak, P. A., Ardhana, I. K., Ariyanti, N. M. P., & Puspitasari, N. W. R. N. (2024). Border studies in southeast Asia: Challenges and opportunities. *Journal of Infrastructure Policy and Development*, 8(15). <https://doi.org/10.24294/jipd9604>
- Panić, B. (2009). Societal security – security and identity. *Carl Schmitt and Copenhagen School of Security Studies*, 13.
- Prasojo, Z. H. (2012). Dinamika Masyarakat Lokal di Perbatasan. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(2). <https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.2.252>
- Primawati, A. (2018). Nasionalisme tenaga kerja Indonesia di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. *Sociae Polites*, 11(30).
- Rahayu, D. D., & Supriyadi, A. A. (2025). Sinergi Kebijakan Publik dan Pertahanan Negara dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Indonesia. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 13(1). <https://doi.org/10.35450/jip.v13i1.942>

- Rahmawati, D., & Afif, F. (2023). Analisis Pengembangan Pariwisata Wilayah Perbatasan Indonesia – Malaysia Di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, 6(2). <https://doi.org/10.23887/jmpp.v6i2.65007>
- Riddell, P. (2001). *Southeast Asia. Islam and the Malay-Indonesian world: Transmission and responses*. Hurst.
- Sahril, S. (2020). BAHASA MELAYU: ANTARA BARUS DAN MALAKA. *Sirok Bastra*, 8(2). <https://doi.org/10.37671/sb.v8i2.206>
- Shamsul, A. B. (1996). Debating about identity in Malaysia: A discourse analysis. *Southeast Asian Studies*, 34(3).
- Sidiq, R. S. S., & Harto, S. (2015). Identitas Budaya Proto Melayu Suku Asli Anak Rawa di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau (Perspektif Antropologi Ekologis). *Politik, Birokrasi Dan Perubahan Sosial Ke-II "Pilkada Serentak, Untung Rugi Dan Korupsi Politik,"* (November).
- Singh, R. P. B. (2008). Heritage contestation and context of religion: Political scenario from Southern Asia. *Politics and Religion Journal*, 2(1).
- Stephan, W. G. (2014). Intergroup Anxiety: Theory, Research, and Practice. *Personality and Social Psychology Review*, 18(3). <https://doi.org/10.1177/1088868314530518>
- Suwartiningsih, S., Samiyono, D., & Purnomo, D. (2018). Harmonisasi Sosial Masyarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1). <https://doi.org/10.18196/hi.71120>
- Tene, R. M. M. (2024). ASEAN Five-Point Consensus on Myanmar. *RSIS Commentary Series*, (2024).
- Than, T. M. M. (2005). The Emergence of Modern Southeast Asia: A New History. *Contemporary Southeast Asia*, 27(3). <https://doi.org/10.1355/cs27-3n>
- Topchiev, M. S. (2025). "Societal Security": Concepts and Approaches. *Voprosy Filosofii*, 2025(1). <https://doi.org/10.21146/0042-8744-2025-1-25-33>
- Utomo, Y. (2025). Kebijakan Publik dan Pertahanan Nasional dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan: Analisis Strategi Keamanan Nasional. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 13(02). <https://doi.org/10.35450/jip.v13i02.1059>
- Wade, G. (2022). SOUTHERN CHINESE PORT CITIES AND THE ISLAMIZATION OF SOUTHEAST ASIA. In *Routledge Handbook of Islam in Southeast Asia*. <https://doi.org/10.4324/9780429275449-6>
- Wilkinson, C. (2007). The Copenhagen School on tour in Kyrgyzstan: Is securitization theory useable outside Europe? *Security Dialogue*, 38(1). <https://doi.org/10.1177/0967010607075964>